

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI





BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 360 /18.8 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016-2021

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PENERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016-2021.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh OPD di Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 260/060 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 24 Juni 2017

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. SOEKIRMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 360 / 18.8 / TAHUN 2017

TANGGAL : 24 Juni 2017 2017

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2016-2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formula/Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
1.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan	Angka Melek Huruf	Merupakan indikator pendukung IPM.	Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis dibagi jumlah penduduk usia di atas 15 tahun	Dinas Pendidikan; BPS
		Rata-Rata Lama Sekolah		Jumlah tahun bersekolah individu di atas 15 tahun ----- Jumlah penduduk di atas 15 tahun	
		Angka Harapan Lama Sekolah	Merupakan indikator pendukung IPM.		
		Persentase siswa yang lulus di PTN	Merupakan ukuran kualitas pendidikan di kabupaten Serdang Bedagai	(Jumlah siswa SMA/MA/SMK yang lulus PTN/Jumlah seluruh siswa SMA/MA/SMK yang lulus) x 100 %	
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan dan masa nifas menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan ibu	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu ----- x 100.000 jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Bayi merupakan awal pertumbuhan manusia dan cikal bakal generasi. Kematian bayi menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan serta ketahanan kesehatan bayi	Jumlah bayi usia 0 - 11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu ----- x 1.000 jumlah lahir hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama	
		Umur Harapan Hidup	Menggambarkan kualitas hidup manusia		

3.	Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK	Untuk mengetahui tingkat kepatuhan kepada peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah.	Opini BPK	LHP BPK
		Nilai Evaluasi SAKIP	Untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem AKIP yang merupakan perwujudan kewajiban untuk pertanggungjawaban organisasi dalam menacapai visi dan misi.	Diukur sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Juklak Evaluasi AKIP	Laporan Hasil Evaluasi
4.	Birokrasi yang efektif	Nilai LPPD	Untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Nomor 6 Tahun 2008	Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kepuasan Materi (IKM).	Setdakab (Bagian Pemerintahan dan Kerjasama)
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Menjadi Target di RPJMN	Skor penilaian SPIP	Inspektorat
5.	Mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Jumlah nilai IKM SKPD yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat ----- Jumlah SKPD yang melaksanakan Survey	Bagian Organisasi
6.	Meningkatnya konsumsi masyarakat	Pengeluaran per-Kapita	Menjadi ukuran kesejahteraan masyarakat	Nilai pendapatan suatu rumah tangga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut dilihat dari sudut pandang ekonomi. Sejauh ini, dalam mengumpulkan data pendapatan, BPS melakukan pendekatan melalui data pengeluaran	BPS
7.	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Angka Konflik SARA	Ukuran toleransi antar umat beragama	Jumlah kejadian konflik	Kesbangpol
8.	Mewujudkan kawasan yang masih menjalankan tradisi lokal	Jumlah Kampung Budaya	Termasuk dalam 21 raihan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai	Jumlah Kampung Budaya	Dinas Poraparbud
9.	Meningkatnya pertumbuhan jumlah investor	Persentase pertumbuhan jumlah investor (PMDN/PMA)	Termasuk dalam 21 raihan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai	Jumlah investasi tahun x – Jumlah investasi tahun (X-1) -----x 100% Jumlah investasi tahun x	Dinas PM dan P2TSP

10.	Meningkatnya kemudahan proses perizinan	Rata-rata hari penyelesaian perizinan	Meningkatnya kecepatan dalam pelayanan perizinan menunjukkan bahwa ada peningkatan kinerja dari seluruh SDM yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.	Rata-rata hari penyelesaian izin= (Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan izin/ Jumlah izin yang terbit)	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
11.	PDRB sektor pertanian	Persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB	Memberikan gambaran pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada perekonomian kabupaten Serdang Bedagai	Jumlah kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ----- x 100 % Jumlah PDRB	Dinas Pertanian ;Dinas Perikanan dan Kelautan; BPS
12.	PDRB sektor perindustrian	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	Memberikan gambaran pertumbuhan sektor industri pengolahan pada perekonomian kabupaten Serdang Bedagai	Jumlah kontribusi sektor industri pengolahan ----- x 100 % Jumlah PDRB	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; BPS
13.	PDRB sektor perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	Memberikan gambaran pertumbuhan sektor perdagangan pada perekonomian kabupaten Serdang Bedagai	Jumlah kontribusi sektor perdagangan ----- x 100 % Jumlah PDRB	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; BPS
14.	Meningkatnya minat masyarakat menjadi wirausaha baru	Persentase masyarakat yang berwirausaha	Merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan daerah	Jumlah pelaku usaha baru ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; BPS
15.	Meningkatnya kesempatan kerja dan	Bertambahnya lapangan kerja	Merupakan Indikator Makro Daerah	Jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi dan UM; BPS
16.	Meningkatnya penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Tingkat Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	PMKS merupakan salah satu sasaran pembangunan.	Jumlah PMKS yang ada ----- x 100 % Jumlah PMKS yang terdata	Dinas Sosial.
17.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga sejahtera dan KS I (%)	Merupakan Indikator Makro Daerah	Jumlah KS dan KS 1 dibagi jumlah keluarga x 100%	Dinas sosial
18.	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap	Sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik ----- x 100 % Panjang seluruh jaringan jalan kabupaten Kriteria jalan dalam kondisi baik : Semua ruas jalan di mana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6 %), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan.	Dinas Bina Marga

		Persentase panjang jaringan irigasi dalam keadaan baik	Jaringan irigasi harus tetap berfungsi dan terpelihara untuk ketersediaan air bagi persawahan padi.	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi yang baik}}{\text{Luas areal persawahan}} \times 100 \%$ <p>Kriteria jaringan yang baik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berfungsi • Terpelihara 	Dinas PSDA
19.	Meningkatkan akses infrastruktur dasar	Persentase Rumah Tangga yang memiliki instalasi air bersih (Sambungan Rumah) (%)	Termasuk indikator 21 raihan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki instalasi air bersih}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	Dinas Perkim
		Persentase rumah layak huni (Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun) (%)	Termasuk indikator 21 raihan	$\frac{\text{Jumlah RTLH}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	Dinas Perkim
20	Meningkatnya penggunaan sumber daya terbarukan sebagai energi listrik	Persentase Rumah Tangga/Unit Usaha yang memiliki energi listrik berasal dari sumber daya terbarukan	Untuk mengurangi beban puncak listrik	$\frac{\text{Rumah Tangga/Unit Usaha yang Menggunakan sumber daya terbarukan Sebagai energi listrik}}{\text{Total Jumlah Rumah Tangga}} \times 100 \%$	Dinas PUPR
21	Menurunnya lokasi terisolir dan tidak teraliri listrik	Jumlah lokasi terisolir dan tidak teraliri listrik	Termasuk indikator 21 raihan	Jumlah lokasi terisolir dan tidak teraliri listrik	Dinas Perkim
22	Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat	Persentase Desa Mandiri (%)	Mendorong kemandirian desa sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun	$\frac{\text{Jumlah desa mandiri}}{\text{Jumlah desa}} \times 100 \%$	Dinas PMD
23	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak	Persentase peningkatan wajib pajak yang taat membayar pajak (%)			
24	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran kualitas lingkungan hidup	$(\text{Indeks Pencemaran Air} \times 30 \%) + (\text{Indeks Pencemaran Udara} \times 30 \%) + (\text{Indeks Tutupan Lahan} \times 40 \%)$	Dinas Lingkungan Hidup
25	Meningkatnya luasan RTH	Persentase kecamatan yang memiliki RTH (Jumlah RTH yang dibangun) (%)	Gambaran kualitas lingkungan hidup	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang memiliki RTH}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup